

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

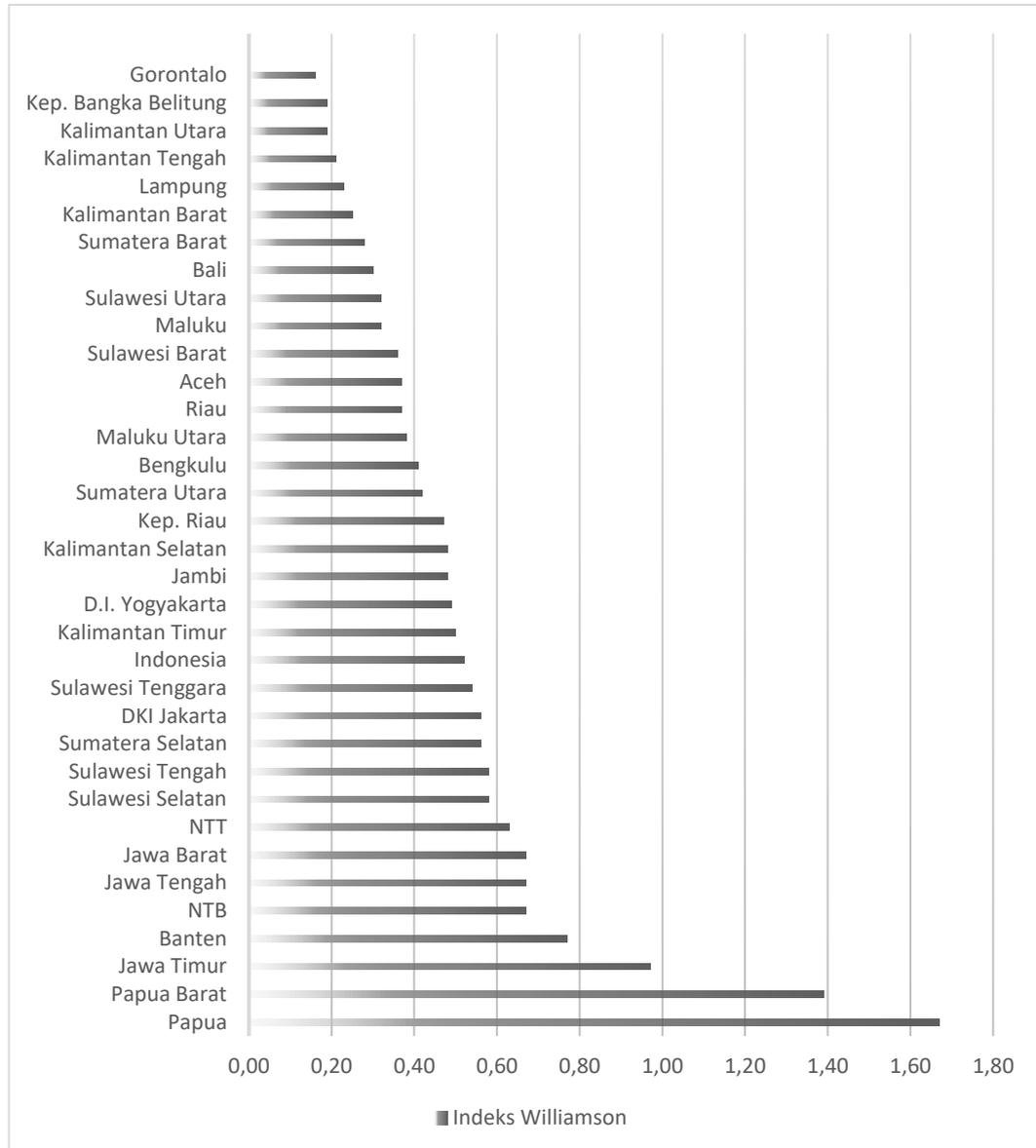
### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum, berbagai negara di seluruh dunia tentu saja memiliki ambisi untuk memperbaiki kualitas hidup dan menginginkan seluruh rakyatnya sejahtera. Hanya saja, tidaklah mudah untuk mencapai ambisi tersebut, karena setiap daerah atau wilayah memiliki potensi sumber daya yang berbeda untuk membangun perekonomian daerahnya. Arsyad (1999) mengemukakan bahwa pembangunan perekonomian merupakan proses terjadinya peningkatan pada pendapatan riil perkapita penduduk dalam jangka waktu tertentu yang diikuti dengan perbaikan dari kelembagaan pada pemerintahan yang bersangkutan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan berbagai potensi sumber daya didalamnya. Daerah seperti pulau Kalimantan yang kaya akan batu bara dan kelapa sawit, Papua yang kaya akan cadangan emas dan mineral, ataupun Riau yang kaya akan pertambangan, serta daerah-daerah lainnya (Sjafrizal, 2018). Perbedaan potensi sumber daya setiap daerah ini akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antardaerah, karena daerah dengan sumberdaya ataupun faktor produksi yang melimpah tentu akan memiliki pendapatan yang lebih besar (Yeniwati, 2013). Selain itu, Todaro (2003) menyatakan ketimpangan pembangunan bisa berdampak positif ataupun negatif. Dampak positif yang diberikan ialah akan mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing serta meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sedangkan dampak negatifnya ialah terjadinya inefisiensi ekonomi, stabilitas sosial serta kecemburuan sosial.

Meskipun Indonesia dan negara berkembang lainnya mengalami ketimpangan pembangunan antar wilayah, Sjafrizal (2018) mengemukakan bahwa negara maju juga mengalaminya, akan tetapi ketimpangan ini tidak terlalu signifikan di negara maju. Oleh karena itu, terdapat dua kategori wilayah didalam satu negara, yakni wilayah maju dan wilayah yang tertinggal.

**Gambar 1.1 Rata-Rata Ketimpangan Pembangunan Provinsi di Indonesia tahun 2013 - 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2023

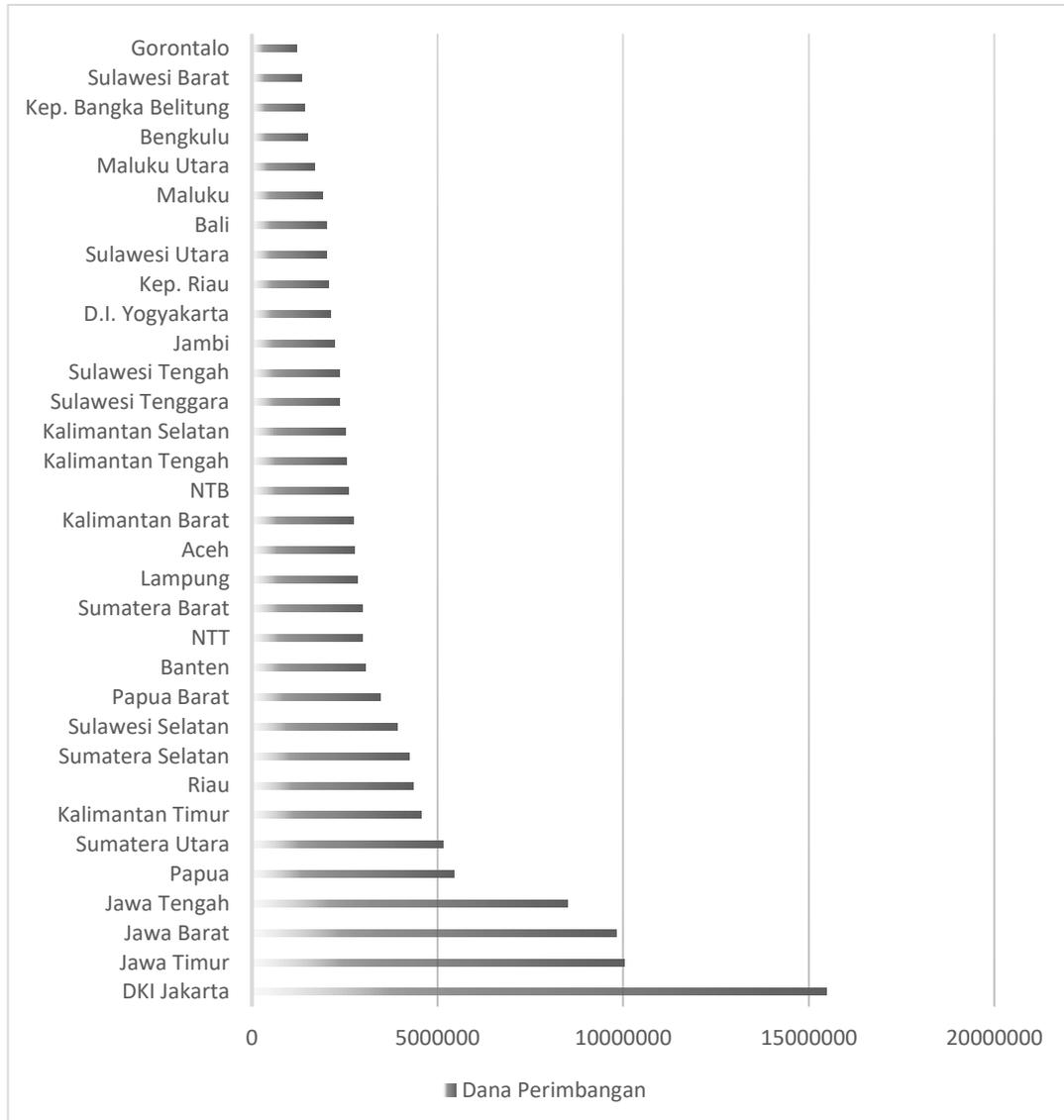
Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa ketimpangan pembangunan provinsi di Indonesia yang diukur dengan menggunakan indeks Williamsson dari tahun 2013 hingga tahun 2022 cenderung mengalami fluktuasi dan rata-rata ketimpangan pembangunan di Indonesia berada di angka 0,52. Sehingga ketimpangan yang terjadi termasuk ke dalam kategori ketimpangan tinggi. Adapun ketimpangan yang terendah berada di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Bangka

Belitung, dan Provinsi Kalimantan Utara yakni berkisar dari 0,16 hingga 0,19 poin. Dan ketimpangan tertinggi berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan indeks sebesar 1,67 dan 1,39 poin.

Permasalahan ketimpangan pembangunan yang terjadi akan mengakibatkan permasalahan multidimensi, seperti sulitnya masyarakat untuk menikmati atau mengakses fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur yang layak. Selain itu, ketimpangan pembangunan yang terjadi juga dapat menimbulkan permasalahan sosial, seperti terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, sehingga berpotensi untuk meningkatkan angka kriminalitas dan pada akhirnya terjadi ketidakstabilan dalam politik dan perekonomian (Muttaqim, 2014). Ketidakstabilan ini dapat mengakibatkan pengaruh buruk kepada perekonomian masyarakat serta perekonomian negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahardiki (2013) mengemukakan bahwa pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara percepatan pertumbuhan perekonomian dengan pemerataan yang terjadi di daerah. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah ialah dengan menggunakan sistem desentralisasi. Untuk memenuhi sistem desentralisasi, pemerintah daerah memberikan hak otonom ke pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri serta membuat kebijakan untuk memberikan alokasi dana transfer yakni berupa dana perimbangan. Dana perimbangan memiliki tujuan serta harapan dapat terjadinya pemerataan fiskal daerah dan antar daerah, selain itu Sjafrizal (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan juga memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

**Gambar 1.2 Rata-Rata Realisasi Dana Perimbangan Provinsi di Indonesia  
Tahun 2013-2022 (Jutaan Rupiah)**

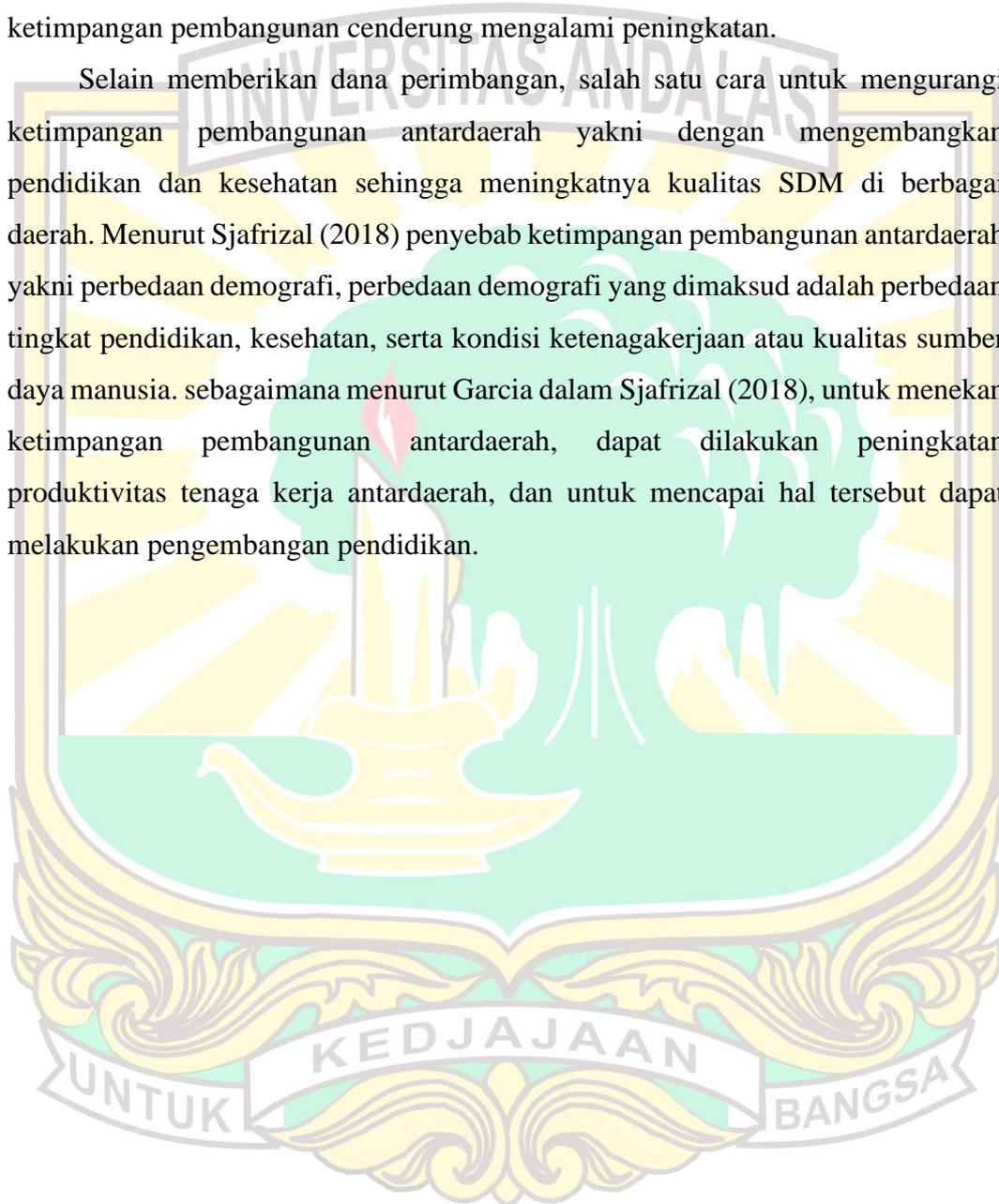


Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

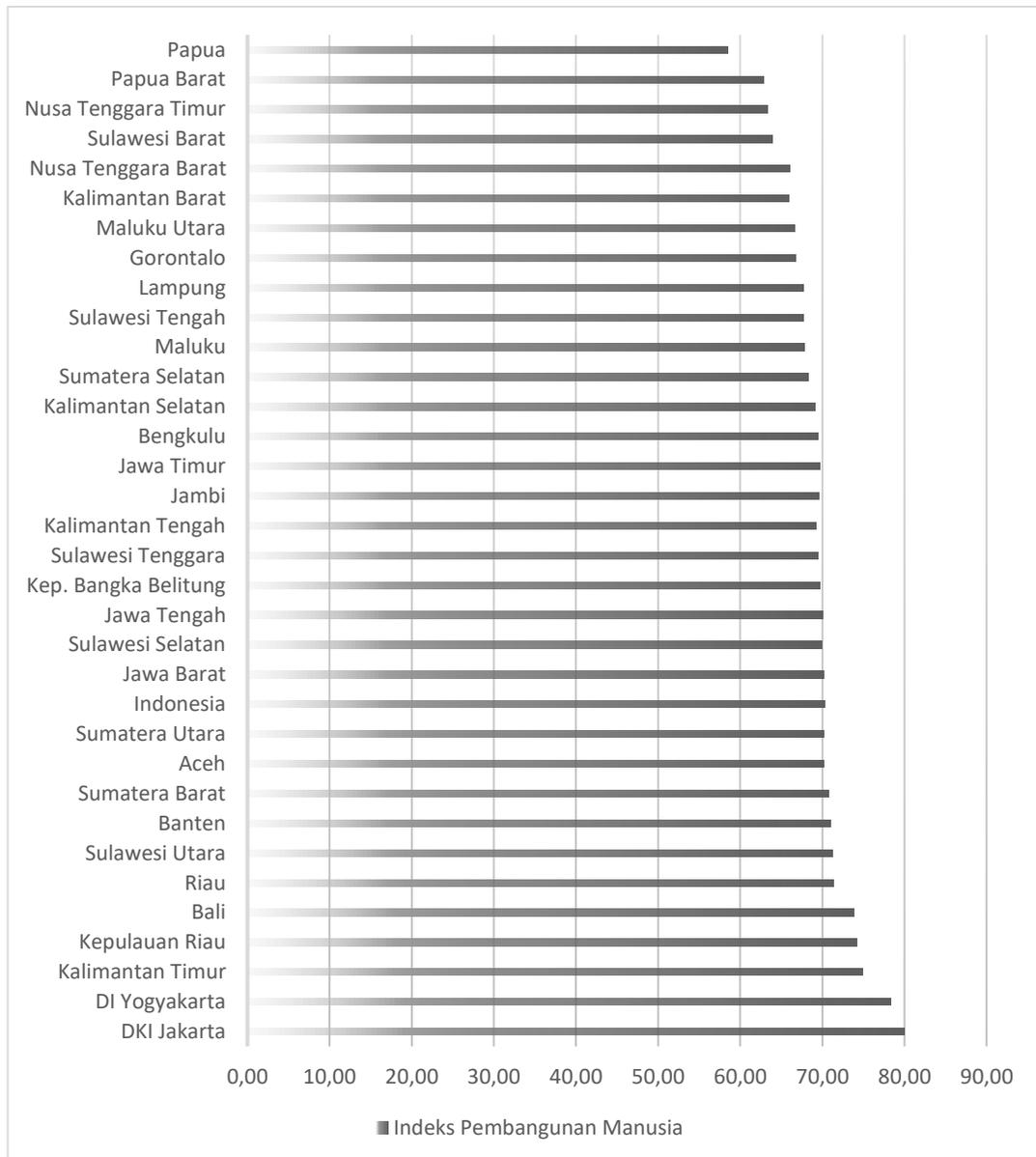
Dari gambar 1.2 dapat diketahui bahwa dana perimbangan yang telah diterima provinsi berbeda-beda disetiap daerah. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Pemerintah daerah yang menerima dana perimbangan tertinggi yakni mayoritas berada di pulau Jawa, seperti DKI Jakarta sebesar 1,54 Triliun, provinsi Jawa Timur sebesar 1 Triliun, dan provinsi Jawa Barat sebesar 981 Miliar. Sedangkan provinsi yang menerima dana perimbangan terendah yakni provinsi

Gorontalo sebesar 121 Miliar, Sulawesi Barat 134 Miliar, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 141 Miliar. Dana perimbangan yang telah diberikan dari tahun ke tahun dengan tujuan mengurangi ketimpangan yang terjadi, tidak serta merta membuat ketimpangan pembangunan menjadi lebih baik, justru sebaliknya, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami peningkatan.

Selain memberikan dana perimbangan, salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah yakni dengan mengembangkan pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatnya kualitas SDM di berbagai daerah. Menurut Sjafrizal (2018) penyebab ketimpangan pembangunan antardaerah yakni perbedaan demografi, perbedaan demografi yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pendidikan, kesehatan, serta kondisi ketenagakerjaan atau kualitas sumber daya manusia. sebagaimana menurut Garcia dalam Sjafrizal (2018), untuk menekan ketimpangan pembangunan antardaerah, dapat dilakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja antardaerah, dan untuk mencapai hal tersebut dapat melakukan pengembangan pendidikan.



**Gambar 1.3 Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia tahun 2013-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia di berbagai provinsi di Indonesia berbeda-beda. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2013-2022 selalu mengalami peningkatan. Adapun Provinsi dengan indeks pembangunan manusia tertinggi yakni provinsi DKI Jakarta dengan

79,99 poin, D.I.Yogyakarta dengan 78,38 poin dan Kalimantan Timur dengan 74,88 poin. Dan provinsi dengan IPM terendah yakni Provinsi Papua dengan 58,44 poin, Papua Barat dengan 62,83 poin dan NTT dengan 63,38 poin. Peningkatan IPM tentu menjadi pertanda baik untuk perekonomian, karena seiring meningkatnya kualitas SDM, maka produktivitas juga cenderung meningkat, sehingga akan mempercepat perekonomian dan akan menurunkan ketimpangan pembangunan yang terjadi. Hanya saja indeks pembangunan manusia yang meningkat tiap tahunnya tidak dibarengi dengan menurunnya ketimpangan pembangunan atau yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ketimpangan pembangunan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Selain perbedaan alokasi dana pembangunan dan kualitas sumber daya manusia antardaerah, Mahardiki, et al. (2013) mengemukakan bahwa dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi ketimpangan yang terjadi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi secara tidak linear terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah. Hubungan tersebut dijelaskan dalam hipotesis Neo-Klasik yang dipelopori oleh Borts (1960). Hipotesis ini merupakan analisis lebih lanjut dari teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dijelaskan oleh (North, 1955).

Hipotesis tersebut menjelaskan bahwa saat tahap awal pembangunan negara, ketimpangan yang terjadi cenderung meningkat. Peningkatan tersebut akan terjadi hingga mencapai titik puncak, dan selanjutnya akan berangsur-angsur menurunnya ketimpangan pembangunan antardaerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan ketimpangan pembangunan yang dapat digambarkan dengan huruf U terbalik. Walau bagaimanapun, temuan hasil penelitian Andiny (2017), memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, dan  $R^2$  dari penelitian tersebut hanya 2%, yang artinya 98% ketimpangan pembangunan dipengaruhi oleh variabel lain. Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh Ismail (2020) yang menganalisis korelasi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat. Hasilnya adalah kurva-U terbalik tidak berlaku dalam penelitian tersebut.

Tentu ketidaksesuaian antara teori dengan fenomena yang terjadi pada penelitian terdahulu terdahulu cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan permasalahan dalam variabel serta ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN REGIONAL DI INDONESIA: PENDEKATAN MODEL PANEL DINAMIS”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dana perimbangan mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Indonesia?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sehingga dapat digunakan sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menjadi panduan untuk menambah wawasan mengenai penelitian tersebut.
2. Manfaat kebijakan, hasil penelitian bisa menjadi sumber acuan yang bermanfaat untuk membuat kebijakan yang strategis di bidang ekonomi secara keseluruhan.
3. Manfaat praktis, diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menganalisis masalah-masalah dan sebagai referensi yang terkait dengan pengambilan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memfokuskan pembahasan serta mencapai tujuan penelitian yang diinginkan, penulis membatasi penggunaan data sekunder yaitu data panel dengan

data time series yakni pada tahun 2013 hingga 2022 dan data cross-sectional yang digunakan adalah 34 provinsi di Indonesia. Adapun penelitian dilakukan dengan mengestimasi model panel dinamis GMM untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, serta IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan memuat latar belakang dari penelitian sehingga timbul suatu permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN LITERATUR**

Bab tinjauan literatur menjelaskan landasan teori dari topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, juga diuraikan tentang beberapa penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Beberapa sub bab dalam bab metode penelitian membahas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan serta teknik analisis data, dan definisi variabel operasional penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab yang akan menjelaskan terkait deskripsi variabel serta menerangkan jawaban dari rumusan permasalahan, uji hipotesis, dan hasil penjabaran dari penelitian.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab yang menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan saran yang dibuat dari hasil analisis yang diperoleh, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.